



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

DIPLOMASI PERTAHANAN MELALUI MULTILATERAL NAVAL EXERCISE KOMODO 2025

Desty Bulandari
Analisis Legislatif Ahli Pertama
desty.bulandari@dpr.go.id

Aulia Fitri
Analisis Legislatif Ahli Muda
aulia.fitri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tahun 2025 menjadi momen penting bagi Indonesia dalam memperkuat diplomasi pertahanan. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) tengah mempersiapkan kegiatan latihan berskala besar, *Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) ke-5, yang akan berlangsung di Bali pada 15–22 Februari 2025 dengan tema "*Maritime Partnership for Peace and Stability*". Presiden RI, Prabowo Subianto, dijadwalkan hadir untuk melakukan *fleet review*, yaitu inspeksi langsung terhadap kapal-kapal perang TNI AL dan kapal-kapal perang asing yang turut serta dalam latihan ini. Armada laut dari berbagai negara akan menampilkan kekuatan militernya, termasuk kapal perang, helikopter, dan pesawat yang diperuntukkan bagi operasi maritim.

Sebanyak 39 negara telah menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan delegasi dalam latihan nonmiliter ini. Setidaknya, 21 kapal perang asing dan 17 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) akan berlatih bersama di Selat Badung. Negara-negara yang mengirimkan kapal perangnya adalah Amerika Serikat, Australia, Filipina, India, Inggris, Iran, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Pakistan, Prancis, Rusia, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam. Sementara itu, negara peserta MNEK ke-5 lainnya terdiri atas Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Belanda, Brunei Darussalam, Chili, Fiji, Irak, Italia, Kamboja, Kanada, Kenya, Kolombia, Laos, Selandia Baru, Turki, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

MNEK merupakan latihan nonkombatan yang diselenggarakan oleh TNI AL setiap dua tahun sejak 2014. Latihan ini bertujuan untuk mempererat kerja sama, meningkatkan interoperabilitas dalam operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, serta memperkuat sinergi angkatan laut negara-negara Asia Pasifik dalam menjaga keamanan maritim di kawasan.

Adapun penyelenggaraan MNEK 2025 akan mencakup latihan fase pangkalan dan fase laut. Kemudian, dilanjutkan dengan di antaranya forum pertukaran pengalaman dan wawasan antarperwira; *International Maritime Security Symposium* (IMSS) di mana perwakilan angkatan laut dari berbagai negara membahas keamanan maritim di tingkat regional dan global; pameran pertahanan; hingga parade budaya. Dalam rangkaian yang sama, ada juga program bakti sosial dan layanan kesehatan bernama *Engineering Civic Action Program* (ENCAP) dan *Medical Civic Assistance Program* (MEDCAP) di Karangasem, Bali.

Kegiatan MNEK dapat dilihat sebagai salah satu bentuk diplomasi pertahanan, di mana instrumen militer digunakan dalam kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional dan internasional. Berdasarkan temuan penelitian Frega Wenas Inkiriwang, diplomasi pertahanan Indonesia melalui MNEK didorong oleh empat motif. *Pertama*, keterlibatan strategis, di mana MNEK bertujuan memperkuat hubungan dengan kekuatan besar dan mitra internasional. *Kedua*, sarana membangun kepercayaan, MNEK ditujukan untuk mengurangi ketegangan antarnegara melalui interaksi langsung dan pertukaran budaya di antara para personel militer. *Ketiga*, peningkatan kapasitas, MNEK memberikan kesempatan bagi TNI AL

untuk mengasah keterampilan dalam operasi pencarian dan penyelamatan, penegakan keamanan maritim, serta respons terhadap bencana dan kejahatan transnasional, yang juga menghasilkan prosedur operasional standar dalam keamanan maritim regional. *Keempat*, reputasi internasional, yang dapat meningkat setelah unjuk profesionalisme TNI serta promosi budaya dan pariwisata nasional.

Secara lebih luas, MNEK mencerminkan pendekatan diplomasi pertahanan maritim yang merupakan bagian penting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, diplomasi pertahanan menjadi pilihan yang rasional untuk mengimbangi keterbatasan kemampuan sistem pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman maritim dan nontradisional. Secara khusus, bagi TNI AL MNEK berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas dan kapabilitas personel serta kemampuan interoperabilitas operasi pertahanan maritim.

Kegiatan MNEK sebenarnya merupakan aktualisasi dari tugas TNI AL di bidang Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Undang-undang ini mengatur bahwa TNI AL memiliki tugas yang tidak diberikan kepada Angkatan Darat dan Angkatan Udara, yaitu diplomasi Angkatan Laut guna mendukung politik luar negeri Indonesia. Dengan demikian, TNI AL berperan strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional melalui diplomasi pertahanan maritim yang tercermin dalam kegiatan MNEK. Dari perspektif politik luar negeri, MNEK menjadi investasi jangka panjang dalam membangun hubungan diplomatik yang lebih solid dan memastikan keamanan maritim Indonesia di masa depan.

Atensi DPR

Komisi I DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu memastikan bahwa MNEK ke-5 yang akan diselenggarakan pada 15–22 Februari 2025, berjalan sesuai dengan kepentingan nasional dan mendukung strategi diplomasi pertahanan Indonesia. Komisi I DPR RI dapat melakukan pengawasan terhadap Kementerian Pertahanan RI dan TNI AL, dengan meninjau kesiapan menyangkut aspek pengamanan di lokasi sampai keterlibatan masyarakat dalam *Engineering Civic Action Program* dan *Medical Civic Assistance Program* sebagai bagian dari MNEK 2025. Lebih lanjut, Komisi I DPR RI dapat mendorong TNI AL untuk menyusun laporan evaluasi terkait dengan kontribusi pelaksanaan MNEK 2025 terhadap keamanan maritim nasional, dengan indikator antara lain berupa peningkatan interoperabilitas dan kapasitas operasional TNI AL.

Sumber

antaranews.com, 5 Februari 2025;
journals.sagepub.com, 5 Mei 2021;
rri.co.id, 5 Februari 2025;
viva.co.id, 5 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making